

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kementerian Integrasi Swedia didirikan pada tahun 1996 hingga 2014 dengan tanggung jawab menjaga kewarganegaraan Swedia dan diskriminasi karena latar belakang agama dan etnis. Namun, pada tahun 1990-an muncul kritik yang menyuarakan kebijakan imigrasi untuk “lumping together” atau menyatukan para imigran yang datang dengan imigran yang telah lama tinggal di Swedia. Di Swedia, istilah integrasi sering digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana imigran dimasukkan tanpa menunjukkan terlalu banyak perbedaan budaya dan agama (Eliassi, 2017: 13).

Ambisi tersebut menciptakan kebijakan integrasi yang didasari ambisi multikultural untuk semua kebijakan yang diekspresikan (Cetrez et al., 2020: 17-18). Saat ini, kebijakan integrasi pemerintah Swedia meliputi hak yang sama, tanggung jawab, dan kesempatan untuk semua orang tanpa memandang latar belakang etnis atau budaya mereka. Kebijakan integrasi tersebut merupakan praktik menghapus perbedaan dengan tujuan bersatu mewujudkan kesetaraan. Kebijakan integrasi didasarkan pada keberadaan seseorang untuk berintegrasi, yaitu seseorang yang berbeda dari mayoritas penduduk—orang luar. Oleh karena itu, bidang kebijakan integrasi meningkatkan dan menolak gagasan perbedaan dan dirumuskan di sekitar konstruksi perbedaan yang mendasar (Grip, 2020: 874).

Kebijakan integrasi mulai berlaku secara optimal pada 1 Januari 2018 dengan tujuan untuk mempercepat dan memfasilitasi integrasi para imigran ke dalam pasar tenaga kerja dan kehidupan sosial (Prop 2016/17: 175 dalam Kausar, 2018: 11). Dahlström (2004) dalam disertasinya menjelaskan bahwa kebijakan integrasi Swedia terdiri dari tiga domain kebijakan integrasi yang terpisah: (i) hukum-politik, (ii) sosial-ekonomi, dan (iii) sosial-budaya (Alexander, 2007 dalam Osanami & Emilsson, 2020: 4). Dimensi hukum-politik terutama menangkap penggabungan sipil dan politik para imigran ke dalam masyarakat. Bagian hukum dari ini mengacu, misalnya, untuk akses ke kewarganegaraan,

undang-undang anti-diskriminasi, dan ketentuan hukum yang khusus untuk kelompok imigran. Dimensi sosial-ekonomi mencakup kategori luas bidang kebijakan, seperti pasar tenaga kerja, pendidikan, perumahan, perawatan kesehatan, jaminan sosial, dan kepolisian. Dimensi sosial-budaya menangkap dimensi yang lebih subjektif dan interaktif dari integrasi imigran. Dimensi ini melibatkan berbagai kebijakan yang mengacu pada proses akulturasi yang mengatasnamakan imigran.

Salah satu negara yang menjadi tujuan migrasi di Swedia adalah Kota Malmö. Sejak tahun 1970-an hingga 1990-an ketika terjadinya krisis keuangan, Kota Malmö telah menjadi salah satu kota yang menerima populasi non-Swedia. Membanjirnya imigran tersebut menimbulkan beberapa masalah utama seperti, imigran pengangguran, segregasi perkotaan dan kondisi perumahan yang buruk di daerah padat penduduk imigran (Scuzzarello, 2015: 59). Namun, di sisi lain Kota Malmö ditanamkan konteks nasional kebijakan integrasi yang dianggap dapat sebagai model masyarakat kesejahteraan multikultural (Castels dan Miller 2001 dalam Scuzzarello, 2015: 59). Mulai pada saat itu, Swedia secara resmi memperkenalkan gagasan multikulturalisme dalam kebijakan imigrannya pada tahun 1974. Mengikuti prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan memilih budaya dan kerja sama, Swedia menjamin imigran hak politik dan sosial-ekonomi yang luas, termasuk hak suara pada pemilihan lokal dan peraturan mudah untuk naturalisasi.

Namun, pada tanggal 28 Agustus 2020 terjadi juga kerusuhan di Kota Malmö yang tidak menggambarkan integrasi Swedia. Kerusuhan tersebut disebabkan adanya aksi unjuk rasa islamofobia yang dilakukan oleh warga lokal Swedia yang mendukung Rasmus Paludan, pemimpin partai Garis Keras ekstremis Denmark yang berwarganegara Swedia (Soderpalm, 2020). Rasmus Paludan merupakan politikus sayap kanan atau mantan pengacara asal Denmark sekaligus pemimpin partai anti-imigrasi yang disebut dengan Stram Kurs (Barak, 2020). Stram Kurs merupakan partai islamofobia yang didirikan pada tahun 2017 oleh Rasmus Paludan. Partai tersebut berfokus pada pembangunan narasi islamofobia dan melibatkan diri dalam tindakan provokatif terhadap Islam dan umat Muslim (Barak, 2020). Sejak tahun 2015, kebencian dan islamofobia

mengalami peningkatan di Swedia hingga muncul berbagai kerusuhan di tahun sebelumnya dan sesudahnya.

Seperti yang terjadi pada tahun 2003, serangkaian pelecehan dan diskriminasi sosial – islamofobia yang meningkat pada bulan September hingga Oktober yang mana orang-orang asing melemparkan bom api ke masjid Islamic Centre di Kota Malmö (U.S. Government Printing Office, 2006: 1624). Kerusakan tersebut terus terjadi sampai awal tahun 2015 yang disertai dengan ancaman pembunuhan dan serangan pembakaran masjid di seluruh negeri. Organisasi masyarakat sipil telah melakukan manifestasi terhadap meningkatnya kekerasan islamofobia tersebut yang diadakan di Stockholm bersama dengan Menteri Demokrasi Alice Bah Kuhnke yang menjanjikan strategi nasional melawan Islamofobia (Mokhtari, 2015 dalam Hübinette, 2018: 59). Namun, hingga saat ini masih menunggu hingga muncul kerusuhan baru di Kota Malmö pada tahun 2020. Dalam Barometer Integrasi (*Integrationsbarometer*), dipublikasikan oleh Dewan Integrasi (*Integrationsverket*) terdapat 2557 responden menjawab pertanyaan tentang sikap terhadap integrasi, diskriminasi, persamaan hak, Islam, dan Muslim yang tinggal di Swedia (Larsson, 2007: 35 dalam Golêbiowska, 2015: 172). Bahkan muncul pengakuan dari Menteri Imigrasi Erik Ullenhag (Partai Rakyat Liberal) di media bahwa meskipun masyarakat Swedia lebih toleran daripada 20 tahun yang lalu, tetap saja terjadi tindakan rasisme.

Dari pemaparan tersebut dipahami bahwa Swedia merupakan negara yang menjunjung tinggi persamaan hak, tanggung jawab, dan kesempatan untuk semua orang tanpa memandang latar belakang etnis atau budaya. Sedangkan, munculnya beberapa aksi kerusuhan islamofobia tersebut dapat menggambarkan bahwa kebijakan integrasi terhadap imigran tidak berjalan dengan baik pada kelompok imigran muslim. Maka dari itu, layak bagi penulis untuk mengkaji penelitian ini lebih lanjut.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Kebijakan Integrasi Sosial-Budaya Pemerintah Swedia tidak berhasil pada imigran Muslim di Swedia?

1.3 Tinjauan Pustaka

Dalam rangka untuk mengetahui alasan Pemerintah Swedia yang belum berhasil dalam menyelesaikan kasus diskriminasi dan islamofobia yang dialami imigran Muslim, penulis mencari beberapa literatur yang membahas mengenai kasus tersebut. Pertama *thesis* dari Lisa Mighton (2010) dengan judul *Immigrant Integration Conflicts in Malmö through a Development Communication Lens*. Tulisan tersebut menjelaskan mengenai Kota Malmö sebagai wujud integrasi Negara Swedia. Namun, menurut Andersson (2007 dalam Mighton, 2010: 6) integrasi di Kota Malmö tidak sepenuhnya berhasil karena terjadinya banyak konflik di dalamnya. Konflik terjadi karena krisis identitas bagi warga negara asli Swedia. Bahkan pinggiran distrik Rosengård di selatan Kota Malmö menjadi simbol konflik di Swedia. Menurut Mighton (2010: 9) Kota Malmö memiliki permasalahan utama yaitu pengangguran karena adanya integrasi yang tidak sepenuhnya berhasil sehingga memunculkan isu diskriminasi dan Islamofobia di kota tersebut. URBACT merupakan program pertukaran pembelajaran Uni Eropa yang diikuti oleh 255 kota dan 29 negara dengan tujuan mencari solusi untuk tantangan yang dihadapi di setiap kota (Mighton, 2010: 26). Namun, dalam *thesis* ini belum membahas secara rinci faktor pendorong dari konflik tersebut.

Penelitian selanjutnya merupakan jurnal dengan judul *The Conditioning of Integrational Policies towards Muslims in Sweden* yang ditulis oleh Golêbiowska (2015) dari Universitas Adam Mickiewicz. Menjelaskan mengenai kebijakan integrasi terhadap muslim di Swedia. Dalam tulisannya dijelaskan bahwa integrasi merupakan konsep yang digunakan untuk membangun hubungan sosial berdasarkan tiga aturan dasar: menghormati perbedaan (ras, etnis, agama, budaya), perlakuan yang sama terhadap individu di pasar kerja, dan hak imigran untuk belajar bahasa Swedia secara gratis. Serpihan kebijakan terhadap imigran, yang diilhami oleh contoh multikulturalisme Kanada, menyatakan: 1) kesetaraan – terutama di pasar kerja dan akses ke pekerjaan; 2) kebebasan – kemungkinan untuk tetap berpegang pada budaya tanah air atau adaptasi dengan budaya Swedia; 3) kerjasama – seandainya dukungan negara terhadap inisiatif imigran, terutama kegiatan organisasi etnis yang menggunakan dialog antara mayoritas dan

minoritas masyarakat (Golêbiowska, 2015: 167). Namun dalam tulisannya juga menjelaskan bahwa masih terdapat oknum yang bertindak rasial dengan disponsori oleh tokoh penting dari Swedia sendiri. Hal tersebut menimbulkan kontradiktif di mana pemerintah yang membuat kebijakan integrasi terhadap muslim, tetapi pemerintah juga dikaitkan dengan isu islamofobia.

Kemudian, penelitian dari *European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) Report in Sweden* tahun 2018, menjelaskan sejumlah insiden ujaran kebencian rasial dan xenofobia telah meningkat selama beberapa tahun terakhir, khususnya dalam konteks kedatangan imigran dalam jumlah yang luar biasa tinggi selama krisis migrasi. Kelompok sasaran utama adalah imigran, Muslim, orang kulit hitam dan Roma. Kebencian antisemit juga tetap menjadi masalah di Swedia. Apalagi, insiden kekerasan rasial masih terus terjadi di Swedia. Namun, hasil tanggapan lembaga penegak hukum dalam hal ini tidak sepenuhnya memuaskan dan tingkat penyelesaian kasus kejahatan rasial tetap rendah (ECRI Report ON Sweden, 2018: 10). Didukung oleh dokumen *Government Offices of Sweden mengenai Measures to combat racism and hate crime* poin 156.97 yang menjelaskan bahwa memerangi xenofobia dengan mengkriminalisasi semua tindakan rasial dan Islamofobia masih menjadi catatan dalam respon Pemerintah Swedia. Meskipun Swedia memiliki undang-undang komprehensif yang menegaskan bahwa seseorang yang dalam sebuah pernyataan atau komunikasinya menyebarkan, mengancam, atau mengekspresikan penghinaan terhadap suatu kelompok penduduk oleh kiasan untuk ras, warna kulit, asal kebangsaan atau etnis, keyakinan agama, orientasi seksual atau identitas atau ekspresi transgender bersalah atas agitasi terhadap kelompok penduduk. Namun, untuk merespon xenofobia dan islamofobia Swedia tidak memiliki aturan yang spesifik karena Swedia merasa dengan KUHP yang dimiliki itu sudah cukup (Government Offices of Sweden, 2020: 16). Adanya hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai seberapa besar pengaruh KUHP yang dimiliki oleh Swedia dalam melindungi imigran muslim ketika muncul kerusuhan islamofobia.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 *Level of Analysis National Identity*

Tajfel (1978: 63 dalam Aichholzer et al., 2021: 297) mendefinisikan identitas sosial sebagai bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuannya tentang keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial (atau kelompok) bersama dengan nilai dan signifikansi emosional yang melekat pada keanggotaan itu. Ketika diterapkan pada hubungan internasional, bangsa mewakili inti dari identitas sosial individu. Seperti halnya semua identitas sosial, identitas nasional adalah konsep umum yang mencerminkan berbagai aspek hubungan individu atau keterikatan dengan bangsanya. Oleh karena itu, identitas disebut sebagai indikator untuk menentukan pilihan atau aksi suatu negara dalam menghadapi suatu keadaan. Hudson (2014: 117) menegaskan bahwa identitas nasional dan budaya dapat menciptakan motivasi domestik dalam proses mengambil kebijakan luar negeri. Secara singkat berarti identitas nasional dan budaya merupakan hal penting yang dapat digunakan sebagai dasar analisis sebuah kebijakan luar negeri suatu negara.

Terdapat dua dimesi dari identitas nasional menurut konsepnya yaitu eksklusif dan inklusif. Aspek eksklusif identitas nasional disebut sebagai chauvinisme atau patriotisme buta yang disebabkan karena adanya rasa superioritas atau permusuhan terhadap bangsa atau budaya lain. Aspek ini melihat identitas nasional sebagai idealisasi bangsa karena bersifat menerima tanpa kritis dan loyalitas terhadap otoritas nasional, negara, dan politik. Aspek inklusif identitas nasional disebut sebagai patriotisme konstruktif atau patriotisme positif dan mengacu pada perasaan positif terhadap negara sendiri yang terkait dengan kebanggaan nasional berdasarkan kebanggaan terhadap institusi politik, budaya, ekonomi, dan sistem kesejahteraan sosial negara (Blank dan Schmidt, 2003; Brown, 2000 dalam Aichholzer et al., 2021: 297).

Identitas nasional terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut: kepentingan nasional bersama, budaya, karakteristik nasional, komunitas sejarah bersama, solidaritas nasional, nilai-nilai politik (Sadowski, 1999 dalam Bałdys & Piątek, 2015: 66). Sesuai dengan permasalahan yang dihadirkan, maka identitas

budaya menjadi pilihan untuk memahami alasan ketidakberhasilan kebijakan integrasi imigran milik Swedia. Budaya secara konsep berarti terus-menerus atau berproses menjadi atau sesuatu yang melekat dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat memengaruhi hubungan antara lokal dan nasional atau antara nasional dan global. Beberapa bangsa melihat budaya merupakan hasil identifikasi dari seperangkat karakteristik nasional yang telah terbentuk sebelumnya. Hal itu dapat dibuktikan bahwa penyebab praktik-praktik esensi yang menciptakan perilaku suatu masyarakat di suatu negara disebabkan adanya budaya yang berakar secara nasional sebagai hasil dari proses material dan simbolik (Crang, 1998: 162 dalam Edensor et al., 2002: 1). Misalnya, terdapat laporan identitas nasional bahwa budaya diproduksi, ditransmisikan, dan diterima. Dipaham menurut Clifford (1992: 101 Edensor et al., 2002: 1), budaya bukanlah 'tubuh yang berakar yang tumbuh, hidup, mati', tetapi lebih merupakan tempat 'perpindahan, gangguan, dan interaksi'.

Smith (1998: 42 dalam Edensor et al., 2002: 3) berpendapat bahwa negara didasarkan pada etnis yang sudah ada sebelumnya, yang artinya negara telah melakukan selektif terhadap budaya leluhur sebelum kemudian diadopsi sebagai budaya resmi oleh negara. Posisi negara terhadap budaya yang sudah ada adalah kompleks, karena budaya tertentu dapat dimusnahkan (terutama dalam hal kekhasan etnis atau agama), atau mereka dapat diadopsi dan diadaptasi oleh pembentukan budaya. Budaya sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu budaya "high" atau budaya yang memiliki banyak pengikut atau diikuti mayoritas individu. Budaya ini juga disebut sebagai budaya populer sehingga budaya tersebut lazim di kalangan masyarakat. Budaya tersebut dinilai lebih menarik dan disukai banyak orang. Budaya ini juga dinilai dapat digunakan sebagai parameter sesuatu yang baik atau buruk. Maka dari itu, budaya "high" kemudian dirancang untuk menenangkan massa dan mengakomodasi mereka dengan kebutuhan modal. Pernyataan tersebut menegaskan dan menyeragamkan budaya populer sebagai sesuatu yang berbahaya secara inheren (Edensor et al., 2002: 13). Kemudian, budaya "low" yang berarti diikuti oleh minoritas individu dan bersifat inferior. Budaya nasional disebut juga sebagai karya elit yang digambarkan dan

dikendalikan secara instrumental, yang dibangun secara historis, 'terwujud dalam mitos, simbol, dan budaya'. Catatan Hutchinson sekali lagi mengesahkan budaya dengan mengedepankan unsur-unsur sejarah. Selain itu, budaya disimpulkan untuk digunakan sepenuhnya untuk alasan instrumental, untuk mengatasi kemajuan politik yang terhambat dan memajukan tujuan nasionalis (Edensor et al., 2002: 10).

Identitas budaya merupakan manifestasi dari atribut sosial manusia yang kemudian dapat memengaruhi identitas individu atau kelompok etnis serta identitas nasional. Oleh karena itu, identitas nasional mengacu pada identitas warga suatu negara dengan tradisi sejarah dan budaya negaranya sendiri, nilai-nilai moral, cita-cita, kepercayaan, kedaulatan nasional, dan sebagainya. Hal ini dimanifestasikan sebagai individu atau kelompok yang percaya bahwa mereka adalah bagian dari suatu negara sebagai komunitas politik (He & Yan, 2008 dalam Liu & Turner, 2018: 1). Namun, pada era globalisasi, identitas nasional semakin menjadi masalah, dan kemajuan teknologi memperluas batas-batas ruang dan waktu yang ditentukan agar tetap terjalin suatu jaringan yang tetap. Adanya batas-batas fisik yang berubah, negara-bangsa sebagai pembawa organisasi yang paling stabil juga mengikuti arus modernitas yang dibawa oleh globalisasi sehingga identitas nasional menghadapi anomie yang tidak jelas pada tingkat subjektif dan tidak memiliki referensi objektif (Liu & Turner, 2018: 2)

1.4.2 Islamofobia

Rasisme budaya terhadap Muslim yang lahir pasca momen krisis 9/11 dibangun di atas konseptualisasi 'ras sebagai budaya,' yang dalam analisis Goldberg (1993 dalam Semati, 2010: 257) mencakup antara lain agama, bahasa, dan pakaian. Cacian sayap kanan terhadap 'kepala handuk' dan kepekaan multikultural menciptakan kebingungan politik internasional dan kekerasan politik karena adanya perbedaan budaya, tradisi, dan agama yang diinformasikan oleh logika rasisme diferensial. Dengan demikian, Islamofobia dipahami sebagai pandangan budaya-ideologis yang berusaha menjelaskan penyakit tatanan sosial secara global dengan mengaitkan agama Islam.

Peristiwa 9/11 memberikan cakrawala untuk menyusun kembali antagonisme dalam bidang sosial-politik secara global yang disebut dalam istilah budaya. Semati berpendapat bahwa daya tarik kategori budaya untuk menjelaskan Muslim mengambil dua bentuk. Pertama, Muslim dipandang sebagai perwujudan peradaban dan budaya inferior. Kedua, upaya dilakukan untuk merangkul perbedaan dengan mencoba 'memahami' budaya dan agama lain. Islamofobia dipandang sebagai respons ideologis dengan mengaitkan Islam sebagai penyakit masyarakat global serta menggabungkan politik, sejarah, masyarakat, dan budaya Timur Tengah ke dalam satu kesatuan dan konsepsi negatif tentang Islam yang esensial sebagai ideologi, kemudian dinilai tidak sesuai dengan ideologi Eropa-Amerika. Hal tersebut akhirnya mewujudkan proyeksi antagonisme yang melekat di jantung masyarakat global (Semati, 2010: 257).

Bentuk islamofobia bergantung dengan perkembangan sosio-politik-historis yang seragam. Islamofobia di berbagai masyarakat Eropa, misalnya, perlu dibedakan dari segi perdebatan dan wacana yang ditanggapinya. Seperti yang dikatakan Fekete (2004: 18 Semati, 2010: 267) terdapat pergeseran dari kebijakan 'keanekaragaman' dan 'multikulturalisme' ke 'asimilasi' dan 'integrasi'. Setiap negara di Eropa memiliki pandangan yang berbeda seperti, 'standar dan nilai' di Belanda; 'hambatan budaya untuk inklusi' di Swedia dan Norwegia; 'lao^cite' (negara sekuler) di Prancis; Leitkultur (budaya terkemuka) di Jerman; 'budaya intoleran' komunitas imigran di Denmark; 'kohesi komunitas' di Inggris; dan 'keamanan publik' di Spanyol. Dengan demikian, tanggapan negara-negara di Eropa bertujuan untuk memutar kembali multikulturalisme dan mempromosikan homogenitas monokultural melalui asimilasi untuk memperluas keamanan negara di Eropa (Fekete, 2004: 3 dalam Semati, 2010: 267). Singkatnya, Muslim dipandang sebagai 'orang asing' dan Islam sebagai ancaman bagi Eropa.

Islamofobia adalah rasialisasi Muslim berdasarkan penampilan fisik atau keturunan sebagai anggota komunitas dan menghubungkan mereka dengan karakteristik budaya atau agama untuk menjelekkan, meminggirkan, mendiskriminasi atau menuntut asimilasi dan dengan demikian memperlakukan mereka sebagai warga negara kelas dua. Islamofobia adalah suatu bentuk rasisme

budaya karena meskipun persepsi dan perlakuan terhadap umat Islam yang memiliki dimensi agama dan budaya, hal itu sama-sama jelas mengandung penampilan fisik atau komponen leluhur (Moodod, 2018: 2)

Pada tahun 1950-an beberapa negara Eropa telah menerima imigran Muslim dari berbagai wilayah di dunia. Imigran Muslim awalnya hadir di Inggris, Prancis dan Jerman. Adanya persebaran imigran Muslim dengan cara dan kecepatan yang berbeda, perlahan-lahan berkembang pemikiran mengenai “minoritas Muslim”, di mana terdapat perbedaan perlakuan yang tajam sehingga terbentuk fenomena “kita versus mereka” atau barat versus muslim (Bloul, 2008: 9). Hal tersebut disebabkan oleh dua faktor menurut literatur, pertama adalah keinginan penduduk untuk menetap guna memenuhi kebutuhan mereka seperti mendirikan masjid, sekolah berbasis islam, dan menyediakan daging halal. Kedua, bagaimana Islamofobia meningkat di Inggris yang bersamaan dengan meningkatnya penduduk yang mengaku beragama Muslim (Bloul, 2008: 9). Terlebih lagi, semakin meningkatnya Islamofobia, semakin banyak Muslim yang menentanginya dan tak terelakkan. Pusat Pemantauan Eropa tentang Rasisme dan Xenofobia (EUMC) telah memantau insiden rasis dan sikap publik serta politik di semua Negara Anggota Uni Eropa tercatat sejumlah laporan yang mendokumentasikan kebangkitan Islamofobia.

1.4.3 Chauvinism

Nasionalisme adalah pemikiran seseorang yang mempromosikan kesejahteraan rakyatnya atau bangsanya sendiri dengan cara melestarikan dan mempromosikan identitas etnis bangsanya (Van & Nieli, 1995: 64). Smith menegaskan bahwa nasionalisme adalah gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, persatuan, dan identitas atas nama populasi. Populasi yang dimaksud adalah manusia yang berbagi wilayah, sejarah, mitos umum, budaya, dan ekonomi serta dapat memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama. Sedangkan *chauvinism* merupakan keadaan pikiran seseorang yang menilai orang atau bangsanya lebih bermartabat dibanding dengan orang atau bangsa lainnya. *Chauvinism* merupakan bentuk dari nasionalis yang terlalu bangga dan jatuh pada

kebingungan atas penilaiannya sendiri. Menurut Britannica (2021) *chauvinism* merupakan sikap patriotisme secara berlebihan dan tidak masuk akal yang berasal dari nama Nicolas Chauvin, seorang tentara Prancis yang mendapatkan penghargaan militer dan pensiun kecil, tetapi setia pada Napoleon. Istilah *chauvinism* hadir untuk melambangkan sikap memuja terhadap hal-hal yang berkaitan dengan militer pada tahun 1815 di antara tentara Napoleon. Namun pada era kontemporer, *chauvinism* populer sebagai jenis dari ultranasionalisme yang berkonotasi kecenderungan terhadap suatu pihak secara berlebihan. Istilah *chauvinism* juga digambarkan sebagai sikap superprioritas terhadap lawan jenis, seperti dalam *chauvinism* laki-laki (Britannica, 2021). Menurut Ramet (1994: 122) terdapat dua definisi untuk memahami *chauvinism*. Pertama, *chauvinism* membagi masyarakat dengan kelompok luar dan kelompok dalam. Melalui kerangka tersebut terdapat solidaritas yang terjalin di dalam suatu kelompok dan merasa unggul daripada kelompok lainnya. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang tidak termasuk dalam pembagian kelompok tersebut akan dihancurkan atau rentan terhadap ketidakseimbangan yang melahirkan tindakan diskriminasi.

Kedua, *chauvinism* dinilai sebagai ego. Ego disini adalah menganggap bahwa kelompoknya merupakan aktor yang superior daripada kelompok lain yang dinilai inferior (Ramet, 1994: 122). Menurut Van & Neili (1995: 64) *chauvinism* juga dinilai sebagai bagian dari nasionalisme. Namun, *chauvinism* cenderung memaksa orang-orang yang lebih lemah untuk masuk ke dalam lingkup pengaruhnya sehingga pembentukan negara sebagian besar dikendalikan olehnya. Oleh karena itu, penting untuk dapat membedakan antara nasionalisme dan *chauvinism*. Nasionalisme merupakan rasa bangga terhadap bangsanya tanpa merasa lebih tinggi dari bangsa lainnya. Para *chauvinis* berpikir dengan nilai yang mereka anut atau yakini memiliki nilai yang lebih tinggi daripada orang lain sehingga mereka berhak mendapatkan hak istimewa dengan mengorbankan kepentingan orang lain yang dianggap lebih rendah (Van & Nieli, 1995: 64). Seperti yang dipaparkan sebelumnya, bahwa *chauvinism* merupakan doktrin yang hadir pada Perang Napoleon yang berpikir bahwa budaya Prancis lebih unggul

dari budaya lainnya sehingga melahirkan hak istimewa bagi masyarakat kebangsaan Prancis.

Chauvinism berhasil menyebar hingga ke Benua Amerika yang diawali dengan adanya perbedaan ketika merekrut anggota di antara orang Negro Amerika, di mana Partai Komunis Tiongkok mengadopsi dua istilah baru yaitu *chauvinism* ras dan *chauvinism* kulit putih. Hal tersebut bertujuan untuk menjunjung tinggi ras kulit putih dan meyakinkan bahwa orang kulit putih lebih baik daripada orang kulit hitam. Menurut catatan New York Times, istilah *chauvinism* ras muncul pertama kali pada tahun 1903 kemudian mendapat perhatian kembali pada tahun 1914, dan kemudian setahun sekali dari tahun 1927 hingga 1932 ketika Partai Komunis Tiongkok melancarkan kampanye anti-*chauvinism*. Sedangkan, *chauvinism* kulit putih muncul dalam catatan New York Times pertama kali pada tahun 1931, dua kali pada tahun 1932, sekali pada tahun 1933 (Flaster, 2005: 258-61). Dalam studi kasus Swedia terdapat tiga hal yang dipengaruhi oleh adanya *chauvinism* sehingga tercipta ketimpangan kesejahteraan antara penduduk asli dan imigran sebagai berikut: 1) adanya prasangka etnis yang menimbulkan jarak sosial; 2) melalui pemahaman langsung pengangguran imigran dalam menerima kesejahteraan di lingkungan sosial; 3) maraknya pengangguran imigran yang disebabkan kompetisi antara penduduk asli dan imigran (Goldschmidt & Rydgren, 2018: 16). Adanya chauvinisme ini akan mendorong terbentuknya Eurosentrisme yang merupakan hasil *chauvinism* dari Euro-Amerika mengenai superioritas Barat. Eurosentrisme dipahami sebagai kecenderungan untuk mengevaluasi seluruh pengalaman sejarah Barat dengan kacamata superior dan, atas dasar itu, menetapkan sebagai lintasan sejarah yang harus diikuti oleh umat manusia lainnya (Kho, 2014: 4). Oleh karena itu, Eurosentrisme dapat memengaruhi keberadaan dan menjadi bagian dari kita, untuk lebih baik atau lebih buruk. Eurosentrisme paling kuat dalam konsekuensinya untuk membentuk mode sosialitas kita. Dengan demikian, itu memengaruhi kita dengan cara yang paling dalam dan primordial (Kho, 2014: 135).

1.5 Hipotesis

Dari kerangka teori di atas, penulis memiliki hipotesis bahwa pengaruh Kebijakan Integrasi Sosial-Budaya milik Pemerintah Swedia bagi imigran Muslim di Swedia tidak berhasil sehingga masih muncul kerusuhan islamofobia di Kota Malmö, yang disebabkan karena adanya sikap chauvinisme oleh masyarakat lokal Swedia. Hal itu juga dipengaruhi oleh Eurosentrisme pada negara-negara di Eropa Barat, termasuk Swedia. Dengan demikian, Swedia cenderung menggunakan kacamata Barat dalam memandang imigran Muslim.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Operasionalisasi Konsep

1.6.1.1 Eurosentrisme

Eurosentrisme telah ada sejak tahun 1790 dengan wacana kedepannya yang meliputi rasisme dan promosi budaya Barat sebagai acuan normatif yang harus diikuti (Hobson, 2014: 335). Eurosentrisme dipahami sebagai kurikulum, buku teks, dan praksis yang menjelaskan mengenai asal-usul pusat pengetahuan hegemonik. Eurosentrisme juga dinilai sebagai suatu kepercayaan tanpa sikap kritis berguna untuk membangun kemajuan sejarah Eropa dan superioritas politik serta etika (Blaut, 1993: 8 dalam Jore, 2019: 115). Dengan begitu, Eurosentrisme dipandang sebagai model interpretasi tanpa kritis dalam membangun gagasan sejarah Eropa yang didukung dengan superioritas politik dan etika atas orang minoritas atau non-Eropa.

Çapan (2018: 1) menegaskan bahwa Eurosentrisme bukan hanya mengenai sejarah, tetapi juga tentang memahami dan meyakini Eropa sebagai asal dan pencetus semua perkembangan, yang dianggap sentral bagi perkembangan hubungan internasional. Dengan demikian, Eurosentrisme dinilai sebagai sistem pengetahuan yang menempatkan Eropa sebagai bagian terpisah dari 'non-Barat'. Singkatnya adalah menempatkan Eropa sebagai kiblat yang selalu di depan dan secara spasial sebagai ruang yang terpisah (Çapan, 2018: 1). Dengan begitu terbagi pengertian, bahwa hierarki ditetapkan ke Barat mengandung nilai rasional, modern, dan berkembang. Sedangkan, hierarki non-Barat mengandung nilai

spiritual, tradisional, terbelakang. Secara logika, masyarakat dituntun untuk berfikir bahwa Eropa merupakan wilayah yang lebih dulu dalam melakukan analisis perkembangan seperti demokrasi, kedaulatan, hak asasi manusia. Sedangkan, wilayah di luar Eropa tidak mengalami perkembangan apapun sebelum Eropa melakukannya (Çapan, 2018: 2).

Eurosentrisme disebut juga sebagai paradigma yang digunakan untuk menafsir masa lalu, sekarang dan masa depan tanpa rasionalitas atau pikiran kritis dalam memikirkan Eropa sebagai wilayah yang superior (Araújo & Maeso, 2015: 1). Oleh karena itu Araújo & Maeso (2015: 2) berupaya untuk memperdebatkan Eurosentrisme yang memiliki klaim mengenai universalitasnya dan validitas mengenai historisnya sebagai kiblat dunia. Eurosentrisme juga merupakan wacana yang menekankan pada keunggulan budaya dan nilai Eropa dengan merendahkan budaya lain. Eurosentrisme memiliki asumsi bahwa peradaban Eropa memiliki keunggulan dalam bidang sejarah sehingga lahir pemikiran mengenai Eropa yang unggul di segala bidang (Xypolia, 2016: 1). Pada akhir Perang Dingin terdapat kebangkitan dari Eurosentrisme sehingga hadir klaim bahwa kemenangan Barat adalah akhir dari sejarah. Dengan demikian, Eurosentrisme menggambarkan bahwa pandangan dunia didominasi oleh kapitalisme Barat yang mengklaim budaya Eropa memiliki manifestasi unik dan paling progresif dari tatanan metafisik sejarah lainnya (Amin, 2009 dalam Xypolia, 2016: 2). Tema yang dimiliki Eurosentris adalah gagasan tentang Euro yang menekankan pada komitmen rasionalisme, kemajuan, dan universalitas. Namun, terdapat kontradiksi mengenai gagasan universalisme dari Eurosentrisme karena pada saat yang sama, Eurosentrisme meremehkan pencapaian dan kontribusi budaya lain karena memiliki karakter *chauvinisme*.

1.6.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian eksplanatori (eksplanatif) karena terdapat karakteristik pertanyaan penelitian yang diawali dengan kata ‘mengapa’. Penelitian eksplanatori akan menyajikan hasil penelitian mengenai hubungan kausalitas atau sebab-akibat antara variabel dalam suatu fenomena. Dipahami

bahwa penelitian eksplanatori akan menemukan penyebab dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam pertanyaan penelitian (Levy, 2002: 2). Oleh karena itu, penelitian ini akan menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis yang telah disebutkan oleh peneliti. Demikian penelitian ini tidak berupaya menciptakan teori baru atau menguji beberapa teori yang telah ada, tetapi penelitian ini akan menggunakan teori dalam membahas permasalahan dalam penelitian, yang berkaitan dengan alasan Kebijakan Integrasi Swedia tidak berhasil bagi imigran Muslim di Swedia sehingga masih muncul kasus kerusuhan seperti di Kota Malmö.

1.6.3 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kerusuhan di Kota Malmö sebagai latar belakang masalah tidak berhasilnya Kebijakan Integrasi Pemerintah Swedia terhadap Imigran Muslim di Swedia. Sementara itu, jangkauan penelitian dimulai pada tahun 2020 ketika terjadi kerusuhan di Kota Malmö akibat chauvinisme dan sikap Eurosentrisme masyarakat lokal Swedia yang masih berlanjut hingga saat ini. Namun, penulis tidak menutup kemungkinan untuk memasukkan data sebelum dan setelah 2020, apabila dibutuhkan dan bermanfaat bagi penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan dari sumber sekunder yang terdiri dari laporan, artikel resmi, dan skripsi dari mahasiswa yang bertempat tinggal di Kota Malmö, yang dikumpulkan dalam sumber online baik situs web resmi maupun video pemberitaan. Kemudian dari buku, jurnal ilmiah, laporan, dokumen resmi pemerintah, artikel yang kredibel dan sumber internet lainnya termasuk majalah online dan media berita.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik analisis data *qualitative content analysis*. Teknik ini memiliki fokus terhadap interpretasi dan pemaknaan data dan teori yang dipilih. Oleh karena itu dalam penelitian analisis kualitatif,

dibutuhkan reduksi data untuk mencari data-data yang relevan dan kredibel, kemudian menyajikan data dan menganalisis dengan teori hingga mencapai satu kesimpulan. Kesimpulan tersebut digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian penulis.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi empat bab. Bab pertama berisi pendahuluan termasuk latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan kepustakaan, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metodologi penelitian. Bab dua terdiri dari korelasi antara *culture* dan islamofobia, chauvinisme dan Eurosentrisme. Bab tiga berisi tentang hasil korelasi kedua aspek dan Kebijakan Integrasi Swedia. Bab empat meliputi kesimpulan dan dari hasil penelitian.